

Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb

Alan Smith Purba¹, Elza Rahmania Dwi Utami²

Magister Akuntansi Universitas Brawijaya

¹Email: alansmithpurba@gmail.com

²Email: elzarahmaniadu@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan ikhtisar literatur empiris pada politik pengaturan standar akuntansi, dengan fokus pada Dewan Standar Akuntansi Keuangan AS (FASB). Meskipun sebenarnya jelas dari pengamatan bahwa politik memang memainkan peran dalam penentuan standar akuntansi, kami berpendapat bahwa lebih banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang topik penting ini. Berdasarkan tinjauan kami, kami menguraikan apa yang kami lihat sebagai sejumlah arah yang berpotensi menghasilkan untuk penelitian di masa depan.

Kata Kunci: standar akuntansi; fasb; politik; lobbying; konsekuensi ekonomi

Impact of the political process on the establishment of accounting standards literature focus study on the fasb

The purpose of this study is to provide an overview of the empirical literature on the politics of accounting standard settings, focusing on the US Financial Accounting Standards Board (FASB). Although it is actually clear from the observation that politics does play a role in setting accounting standards, we argue that more can be done to improve our understanding of this important topic. Based on our review, we outline what we see as a number of potential directions for future research.

Keywords: *accounting standards; fasb; politics; lobbying; economic consequences*

PENDAHULUAN

Standar akuntansi telah mengalami perkembangan yang pesat, standar dibentuk untuk mengurangi moral hazard yaitu manajemen berusaha untuk overstated (aktiva dan revenues) dan understated (liability dan cost) walaupun pada akhirnya juga muncul moral hazard yang lain yaitu proses politik. pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. Standar yang dibentuk digunakan sebagai disclosure, uniformity, regulation, and measurement (Mardiyah, 2002:97).

Menurut Baldwin dan Cave (1999), menyatakan bahwa banyak pihak yang melihat regulasi sebagai sebuah kontrol berkelanjutan dan terfokus hanya pada lembaga publik atas kegiatan yang dinilai oleh komunitas. Dalam Undang-undang Korporasi, regulasi dapat dilihat sebagai serangkaian perintah khusus, seperti penunjukan direktur perusahaan. Ada sejumlah alasan diberlakukannya regulasi/pengaturan (Baldwin dan Cave, 1999).

Negara-negara ekonomi di seluruh dunia memberikan banyak variasi dalam pengaturan, penegakan, dan aktivitas ekonomi dan politik untuk membantu mengidentifikasi hubungan antara kedua hal tersebut. Memahami motivasi teori regulasi ekonomi dan politik dalam penetapan standar akuntansi membantu pemahaman terhadap teori regulasi itu sendiri. Terutama di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem pasar bebas. Menurut Zeff (1972), dalam dekade 1970-an masyarakat Amerika cukup tertarik melalui intitusi-institusi dalam menyoroti aspek sosial, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi yang dikristalisasikan dalam opini publik dalam penyusunan standar akuntansi.

Salah satu bentuk regulasi adalah yang dilakukan oleh pemerintah AS atas potensi pertumbuhan monopoli pada pergantian abad ke-20. Monopoli dianggap sebuah kegagalan pasar jika persaingan tidak ada. Dari sini dapat disimpulkan bahwa peraturan dikaitkan dengan pelestarian adanya persaingan dan dikaitkan dengan ideologi keberhasilan pasar dan persaingan. Peraturan diperlukan untuk bergerak menuju keseimbangan atas beberapa ketidaksetaraan. Peraturan seperti itu berfungsi untuk melindungi kepentingan umum atau kolektif modal dan persyaratan proses akumulasi modal.

Pada mulanya akuntansi dipandang sebagai subjek non politik. Keterlibatan politik lebih banyak di bidang matematik atau astronomi, psikologi, survei, teknologi komputer, atau statistik (Solomons, 1978). Perkembangan selanjutnya, pada saat penetapan standar akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku ekonomi. Dengan demikian akuntansi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan proses yang disebut dengan proses politik (Solomons, 1978).

Dimulai dengan Watts (1977) dan Watts and Zimmerman (1978), Study telah berusaha mengembangkan dan menguji teori-teori berbasis ekonomi dari pengaturan standar yang menggunakan kekuatan politik. Study ini menjelaskan Pengaruh politik atas penetapan standar sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi dengan tujuan memengaruhi hasil proses tersebut untuk meningkatkan nilai atau kekayaan ekonomi entitas atau mencapai beberapa tujuan yang mementingkan diri sendiri.

Tujuan study ini adalah untuk mensintesis study literatur yang ada pada politik pengaturan standar di Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat (FASB). Proses penetapan standar menunjukkan bahwa politik memiliki pengaruh yang signifikan tentang bagaimana standar akuntansi ditetapkan. Beberapa artikel mengungkapkan bahwa politik dalam akuntansi menjadi signifikan, misalnya: Gerboth (1973), Horngren (1973), serta May dan Sundem (1976). Sundem (1976), menyatakan bahwa bukan merupakan kejutan bila FASB adalah badan politik, sebab proses seleksi alternatif akuntansi merupakan proses politik” atau dengan kata lain FASB harus mempertimbangkan aspek politik secara eksplisit (misal kesejahteraan sosial) seperti keputusan teori akuntansi dan riset akuntansi.

Fokus utama study ini adalah melakukan study literatur yang ada pada penetapan standar. Study ini mengklasifikasikan beberapa pembahasan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, Study ini

membahas tentang lobbying politik dalam proses penetapan standar. Study ini untuk menjelaskan bahwa pengaturan standar sebenarnya terbatas pada keputusan FASB, namun, karena terdapat sebagian pihak yang melakukan lobbying dalam proses penetapan standar, maka FASB memutuskan untuk menambahkan proyek ke dalam agendanya. Kedua, study ini terbatas pada agenda penetapan standar oleh FASB. Ketiga, study lain membahas politik penetapan standar secara lebih luas daripada lobbying comment-letter. Dengan memperluas pandangan pada study ini kemungkinan penting jika kita ingin mengetahui sepenuhnya tentang pengaruh politik atas pengaturan standar.

Dengan adanya ulasan ini akan menghasilkan minat baru dalam study tentang politik pengaturan standar akuntansi. Study ini menunjukkan bahwa ada sejumlah peluang yang berpotensi menghasilkan yang sebagian besar masih belum dijelajahi. Mengingat pentingnya aturan akuntansi dalam ekonomi, sesuatu yang dibuat dengan jelas oleh krisis keuangan yang pernah terjadi, kami berasumsi bahwa lebih banyak penelitian positif dapat membantu menginformasikan diskusi kebijakan yang sedang berlangsung di bidang ini dengan lebih baik.

Tinjauan Pustaka

Teori Ekonomi-Politik

Studi tentang ekonomi politik secara historis tidak dapat dipisahkan dari buku karya Adam Smith yang berjudul *The Wealth of Nations* yang diterbitkan pada tahun 1776 yang secara transparan telah memperkenalkan dasar-dasar pemikiran ekonomi politik. Istilah ekonomi politik sendiri pertama kali sudah muncul pada abad ke-16 oleh penulis Perancis bernama Antoyne de Montcheitien (1575-1621) dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political Economy*.

Deliarnov (2006:8), Mendefinisikan ekonomi politik merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Secara lebih lanjut menguraikan definisi tentang ekonomi politik mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling berkaitan dan bagaimana seharusnya mereka terkait. Menurut Caporaso J.A., Levine D.P (1992) pemaknaan terhadap ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran mengenai pengelolaan masalah ekonomi kepada penyelenggara negara. Ekonomi politik oleh pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Dalam hal ini mereka mempelajari institusi politik sebagai keberadaan yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi politik yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat.

Menurut Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, (2001) ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin atau disiplin politik saja. Penggabungan antara ekonomi dan politik sangat diperlukan, jika kita berbicara mengenai ilmu ekonomi atau ilmu politik saja secara terpisah, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan gejala dan masalah yang dihadapi secara nyata dalam interaksinya.

Studi ekonomi politik sendiri sebenarnya diawali dengan riset-riset mengenai hubungan antara sistem politik dan kinerja ekonomi. Banyak dari hasil riset tersebut yang tidak terlalu menyatu atau berhubungan. Dengan demikian maka selanjutnya studi digeser untuk melihat hubungan antara stabilitas politik dengan pencapaian ekonomi. Yustika (2013:100) menjelaskan bahwa stabilitas politik secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, instabilitas politik akan memperburuk produktivitas serta menekan akumulasi modal fisik dan manusia.

Yustika (2013:100), menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggara politik, baik aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, yaitu bahwa instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan menggunakan setting sistem politik dimana peristiwa ekonomi terjadi. Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan (a way of acting), sedangkan politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut. Hal ini menyatakan bahwa pendekatan ekonomi politik tidak berupaya untuk mencampur analisis ekonomi dan politik untuk mengkaji suatu persoalan, melainkan dua aspek yang saling berhubungan untuk memperlihatkan fakta yang terjadi di lapangan.

Menurut Caporaso J.A., Levine D.P (1992) ilmu ekonomi dan ilmu politik memang berlainan, dimana keduanya mempunyai alat analisis yang berbeda dan bahkan asumsi yang belawanan. Tentunya tidak mungkin untuk menggabungkan alat analisis ekonomi dan politik. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan ekonomi politik mempertemukan antara bidang ekonomi dan politik dalam hal alokasi sumber daya ekonomi dan politik (yang terbatas) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi dari kebijakan ekonomi politik selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan aspek sosial (masyarakat) yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Standar Akuntansi

Definisi

Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body). Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat; bagaimana cara mencatatnya dan bagaimana penyajiannya.

Standar akuntansi ini adalah permasalahan utama akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan format penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan berubah dan berkembang sesuai tuntutan di masyarakat. Menurut FASB, standar akuntansi didefinisikan sebagai metode yang seragam untuk menyajikan informasi sehingga laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan lebih mudah dengan kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum.

Standar Setting

Proses pembentukan standar akuntansi atau sering disebut standar setting process merupakan proses yang cukup pelik karena melibatkan aspek politik, bisnis, sosial dan budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini dikarenakan standar-standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak. Standar akuntansi akan berkembang seiring dengan perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Perkembangan ini telah terjadi beratus-ratus tahun, tapi proses penetapan resmi yang ada sekarang baru dikembangkan sejak lima puluh tahun yang lalu, karena seperti yang kita ketahui akuntansi berkembang sangat cepat sejalan dengan adanya revolusi industri di dunia. Maka prosedur akuntansi selama ini sering dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang berkepanjangan.

Para akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan memenuhi kebutuhan perusahaan mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan prosedur yang berbeda-beda diantara berbagai perusahaan dalam perlakuan akuntansi untuk aktivitas yang sama. Selama tahun 1920-an nilai pasar saham naik lebih tinggi dibanding dengan nilai riil terjamin yang mendasarinya sampai seluruh struktur tersebut ambruk pada saat terjadinya malaise (crash) pasar modal tahun 1929. Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt berusaha untuk menangkali terjadinya depresi dan di antara berbagai tindakan yang diambil. Ia menciptakan satu badan yang diberi nama Securities and Exchanges Commission (SEC atau Bapepam AS). Badan ini bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para investor dengan memastikan adanya ketentuan mengenai pengungkapan yang lengkap dan layak di dalam peraturan pasar modal.

Political Influence

Gipper, B., B. Lombardi, and D.J. Skinner (2013), mendefinisikan pengaruh politik atas penetapan standar sebagai intervensi yang disengaja dalam proses penetapan standar oleh entitas ekonomi dengan tujuan mempengaruhi hasil dari proses tersebut untuk meningkatkan nilai ekonomi atau kekayaan entitas atau mencapai tujuan lain yang tidak sesuai kepentingannya sendiri. dengan misi FASB. Dalam pandangan ini, pengaruh politik muncul ketika posisi pengaruh pengatur standar ini dirubah dari jawaban benar, yang berarti standar telah mencapai tujuannya. Horngren (1973) dalam (Mardiyah, 2002:102), menyatakan bahwa penetapan standar akuntansi merupakan produk politik baik secara logika maupun secara empiris.

Ramanna (2008), menemukan bahwa perusahaan yang memiliki insentif untuk melobbying terhadap penghapusan penggabungan sebagai metode akuntansi yang dapat diterima untuk kombinasi bisnis dapat dihubungkan melalui kontribusi politik kepada anggota Kongres yang menjadi terlibat menentang proposal Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) tentang masalah ini. Johnston dan Jones (2006), mengidentifikasi masalah akuntansi penting yang dipertimbangkan oleh FASB dari tahun 1999 hingga 2000 dan menemukan bahwa pengeluaran lobbying politik perusahaan terkait dengan minat mereka pada isu-isu tersebut. Kedua studi tersebut menyajikan bukti pengaruh politik pada standar akuntansi di bawah pengaturan standar sektor swasta.

Agenda Standar-Setter

Penentu penting dari standar akuntansi adalah bagaimana isu-isu akuntansi tertentu dimasukkan dalam agenda standar setter, dan bagaimana agenda FASB ditetapkan, namun ada beberapa penelitian empiris bahwa kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan proyek mana yang FASB putuskan untuk ambil.

Beresford, D. R. (1993) pada saat itu ketua FASB, mengatakan sebagai berikut: “Saya terus percaya bahwa pengaturan agenda adalah satu keputusan paling penting yang kami buat di FASB. Namun, untuk semua proses dalam pembentukannya, itu mungkin salah satu kegiatan yang paling tidak kita pahami

Leftwich (1995) menunjukkan bahwa topik agenda potensial berasal dari setidaknya empat sumber: (i) Komite Penasihat Standar Akuntansi Keuangan (FASAC) melalui survei tahunan; (ii) Emerging Issues Task Force (EITF); (iii) pertemuan dewan dengan kelompok konstituen, termasuk SEC, dan (iv) korespondensi yang tidak diminta dari berbagai pihak.

Howieson (2009) menunjukkan bahwa sumber-sumber proyek agenda banyak dan beragam yang sifatnya mekanisme formal maupun informal, termasuk pemantauan staf pers bisnis serta interaksi Dewan dengan para penyusun dan auditor.

Bertomeu and Magee (2011) fokus pada sektor keuangan untuk memodelkan hubungan antara siklus ekonomi dan intervensi politik dalam penetapan standar. Ide dasar dalam penelitiannya adalah bahwa ketika kondisi ekonomi menurun, kekuatan politik sejajar dengan memperlemah transparansi keuangan, yang memungkinkan lebih banyak kredit macet yang harus dibuat. Resesi berikutnya menyebabkan tekanan untuk peningkatan transparansi, menyebabkan penyesuaian dalam kegiatan ekonomi. Kekuatan-kekuatan ini kemudian melemah ketika ekonomi membaik.

Proses Politik dalam Pembentukan Standar Akuntansi

Pendapat May dan Sundem (1976), adalah dalam praktek maupun teori, pengaruh kuat laporan akuntansi pada kesejahteraan sosial perlu dicatat. Sehingga bukan merupakan kejutan bila FASB adalah badan politik, sebab proses seleksi alternatif akuntansi merupakan proses politik” atau dengan kata lain FASB harus mempertimbangkan aspek politik secara eksplisit (misal kesejahteraan sosial) seperti keputusan teori akuntansi dan riset akuntansi.

(Mardiyah, 2002:102) Menjelaskan bahwa Financial Accounting Foundation menyatakan “Proses penetapan standar akuntansi dapat digambarkan sebagai suatu demokrasi karena semua peraturan yang dibuat tergantung pada perizinan pembuat peraturan. Tetapi karena penetapan standar berkaitan dengan kepentingan sosial maka semua pendapat harus didengar (penyusunan standar bersifat menyeluruh dan tidak hanya yang bersifat specific group). Proses penyusunan standar sebagai proses politik karena ada upaya mendidik dalam memperoleh standar baru. Disamping itu dalam penyusunan standar ada tanggungjawab FASB kepada setiap orang.

Ada aspek politik dalam akuntansi seperti halnya ada aspek politik secara fisik. Sehingga perlu hati-hati apakah politik berperan atau tidak dalam penetapan standar akuntansi. Implikasinya FASB dimasa depan perlu memperhatikan isu ini karena berkaitan dengan kredibilitas akuntansi itu sendiri. Pertimbangan politik bisa mempengaruhi formulasi standar akuntansi dan mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan akhirnya mempengaruhi tujuan ekonomi secara makro.

Penelitian tentang lobbying selama proses penetapan standar.

Watts dan Zimmerman menjelaskan konsekuensi ekonomi dari aturan akuntansi memunculkan sejumlah besar studi tentang lobbying selama proses penetapan standar, Sebagian besar study di bidang ini didasarkan lobbying melalui comment letter oleh perusahaan dan manajer kepada penyusun standar terhadap aturan akuntansi yang diusulkan seperti memorandum diskusi, draf paparan, atau dokumen

"pandangan awal". Study ini lebih menjelaskan bagaimana bentuk lobbying yang dilakukan oleh perusahaan akuntansi (audit) dan entitas lain.

Comment letter Lobbying oleh perusahaan (preparers)

Watts dan Zimmerman (1986), berpendapat bahwa perusahaan yang terkena tekanan peraturan dan politik (perusahaan besar) lebih cenderung untuk melobbying aturan akuntansi yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Sebaliknya, terdapat perusahaan yang cenderung melobbying aturan akuntansi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Watts dan Zimmerman menguji ide-ide ini menggunakan comment letters yang menanggapi diskusi FASB Februari 1974 yang mengusulkan General Price Level Accounting (GPLA) dalam laporan keuangan (sebagai pengungkapan tambahan).

Watts dan Zimmerman pertama mengklasifikasikan tanggapan comment letters perusahaan menjadi "ya" dan "tidak" (menggunakan atau menentang proposal) dan memperkirakan kemungkinan efek GPLA pada pendapatan yang dilaporkan perusahaan-perusahaan ini. Mereka menemukan bahwa dari 26 perusahaan dengan pernyataan yang diusulkan, 8 memilih ya dan 18 memilih tidak; dan bahwa 8 suara ya berasal dari perusahaan yang lebih besar, konsisten dengan hipotesis biaya politik. Dari 8 perusahaan dengan kemungkinan peningkatan pendapatan atau tidak ada perubahan, 7 memilih tidak. Tenor umum hasil ini dikonfirmasi dalam analisis multivariat mereka, di mana interaksi antara ukuran perusahaan dan tanda efek pada pendapatan adalah positif dan sangat signifikan (menyiratkan bahwa perusahaan yang lebih besar yang pendapatannya akan menurun mendukung aturan yang diusulkan) hasil yang umumnya konsisten dengan prediksi mereka. Namun, hasil lain kurang kuat, kemungkinan karena ukuran sampel yang relatif kecil dan kurangnya daya, masalah umum dalam studi ini.

Kelly (1982) mengadopsi pendekatan yang mirip dengan Watts dan Zimmerman untuk mempelajari comment letters lobbying oleh perusahaan dalam menanggapi rancangan eksposur 1974 FASB tentang GPLA. Kelly menggunakan sampel dari 52 perusahaan, 14 di antaranya menentang posisi rancangan eksposur, untuk memeriksa apakah posisi lobbying terkait dengan rencana kompensasi manajemen, leverage, kepemilikan manajemen, dan ukuran. Dia tidak dapat menemukan banyak hasil, mungkin karena kekuasaan yang terbatas. Dalam sebuah makalah tindak lanjut, Kelly (1985) meneliti karakteristik perusahaan yang memilih untuk melobbying pada rancangan eksposur ini dengan membandingkannya dengan perusahaan yang tidak melobbying. Sekali lagi, penelitian ini terhambat oleh ukuran sampel yang kecil (ada paling banyak 38 perusahaan dalam berbagai subsamples yang melobbying). Satu-satunya temuan kuat adalah bahwa perusahaan melobbying lebih besar dari perusahaan yang tidak melobbying, hasil konsisten dalam literatur ini.

Francis (1987) melihat lobbying pada dokumen proses hukum FASB yang menghasilkan SFAS-87 yang dikeluarkan Desember 1985. The FASB awalnya mengeluarkan Memorandum Diskusi (1981) diikuti oleh Views Preliminary (1982) dan kemudian Memorandum Diskusi lain (1983). Dua dokumen terakhir menarik lebih dari 500 comment letters. Mereka diikuti oleh Exposure Draft pada tahun 1985 yang menghasilkan 400 comment letters lagi, masing-masing menghasilkan sejumlah besar comment letters, sebelum mengeluarkan standar akhir. Fakta-fakta ini saja tampaknya informatif tentang proses di mana standar ditetapkan.

Studi Francis melihat comment letters yang diterima sebagai tanggapan terhadap dokumen Pandangan Pendahuluan. Dokumen tersebut menghasilkan lebih dari 500 comment letters, dimana 319 berasal dari perusahaan industri sebagian besar yang menentang aturan baru. Sampel terdiri dari 218 perusahaan dimana data Compustat dan pensiun tersedia. Penulis menggunakan sampel perbandingan dari 582 perusahaan non-lobbying yang Compustat dan data pensiun juga tersedia.

Analisis utama penulis terdiri dari regresi logit yang dirancang untuk memodel keputusan perusahaan untuk melobbying sebagai fungsi ukuran perusahaan, serta neraca dan laporan laba rugi sebagai efek dari aturan. Penulis menemukan bahwa perusahaan yang besar dengan efek laporan keuangan yang merugikan dari aturan lebih cenderung melobbying terhadap aturan yang diusulkan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan melobbying ketika mereka cenderung menderita konsekuensi pelaporan keuangan yang merugikan dari aturan baru.

Salah satu masalah akuntansi paling kontroversial yang ditangani oleh FASB adalah akuntansi minyak dan gas. Sebagaimana dibahas di atas, masalah ini secara efektif ditambahkan ke agenda FASB oleh Kongres, dan akhirnya standar diumumkan oleh FASB tetapi standar tersebut ditimpa oleh aturan SEC yang mengembalikan metode biaya penuh, salah satu contoh ketika SEC telah merebut kekuasaan FASB untuk menetapkan aturan akuntansi. Jadi jelas bahwa masalah ini adalah kepentingan politik yang besar, yang membuatnya menjadi kandidat yang bagus untuk dipelajari.

Deakin (1989) dengan demikian terkenal dari sudut pandang metodologis karena ia mempelajari insentif perusahaan untuk melobbying akuntansi minyak dan gas dan dimulai dengan daftar FASB dari semua 137 perusahaan AS yang terdaftar yang menggunakan metode biaya penuh (FC); yaitu, dia punya set lengkap perusahaan yang akan terpengaruh oleh aturan baru. Deakin menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan lobbying oleh perusahaan-perusahaan FC dengan data laporan keuangan yang tersedia pada: (a) memorandum diskusi FASB Desember 1975 (27 lobbying perusahaan; 67 tidak), (b) draft eksposur FASB bulan Juni 1977 (51 lobbying perusahaan; 67 tidak), dan (c) sebelum SEC pada Maret 1978 (50 lobbying perusahaan; 68 tidak), dan demikian mencakup bagian proses yang relatif lengkap.

Dalam analisis utama, penulis memperkirakan tiga regresi logit yang secara kolektif mendukung gagasan bahwa lobbying didorong oleh rencana kompensasi manajemen dan insentif kontrak utang, serta oleh tingkat kegiatan eksplorasi minyak dan gas perusahaan, dan sebagian besar konsisten dengan pandangan konsekuensi ekonomi melobbying. Hasil penulis relatif kuat mungkin karena dua aspek desain pengaturan: (a) masalah minyak dan gas jelas merupakan masalah ekonomi dan politik yang penting pada saat itu, dan (b) ketersediaan aset lengkap perusahaan-perusahaan FC dan keputusan untuk memeriksa partisipasi mereka dalam beberapa tahap proses lobbying.

Sebagai contoh terakhir, Dechow dkk. (1996) memeriksa karakteristik perusahaan yang melobbying pada tahun 1993 FASB ED pada akuntansi untuk ESO. Mereka menemukan bahwa kemungkinan mengirimkan comment letters yang menentang pengeluaran opsi saham sangat terkait dengan penggunaan opsi saham dalam kompensasi eksekutif puncak, termasuk tingkat kompensasi itu. Para penulis menyimpulkan bahwa eksekutif mungkin khawatir tentang pengawasan publik terhadap tingkat kompensasi berbasis saham mereka yang relatif tinggi. Selain itu, mereka menemukan bahwa argumen “biaya modal” yang diajukan dalam surat-surat ini adalah alasan untuk menyamarkan keprihatinan para eksekutif yang mementingkan diri sendiri.

Studi ini setidaknya menjelaskan dua hal. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya mendokumentasikan lobbying politik oleh manajer atas nama perusahaan mereka, misalnya, argumen biaya politik adalah tentang mengurangi eksposur perusahaan terhadap proses politik, dan dengan begitu mengurangi nilai sekarang dari kerugian politik yang diharapkan bagi pemegang saham. Sebaliknya, Dechow, dkk. menyajikan bukti manajemen melobbying langsung demi kepentingannya sendiri. Kedua, mereka melaporkan bahwa FASB menerima lebih dari 1.700 komentar surat di ED, di mana penulis menganalisis 347 dari perusahaan, yang semuanya menentang posisi ED. Dari comment letters lainnya, 953 adalah surat formulir (surat yang sama yang diterima dari entitas yang berbeda), sebuah fenomena yang mungkin menarik dalam dirinya sendiri sebagai bentuk lobbying.

Studi-studi yang dirangkum pada poin ini memberikan bukti tentang melobbying oleh para penyusun (perusahaan atau manajer). Kami selanjutnya membahas lobbying oleh pihak lain.

Lobbying oleh pihak lain, termasuk kantor audit

Puro (1984) melakukan penelitian tentang lobbying oleh auditor. Untuk melakukan ini, dia menyelidiki dua prediksi luas,. Pertama, dia memeriksa prediksi apakah perusahaan audit melobi kepentingan pribadi mereka (pengambilan peraturan). Kedua, dia memeriksa prediksi bahwa auditor melobbying atas nama kepentingan ekonomi klien mereka di bawah argumen konsekuensi ekonomi konvensional.

Untuk melakukan analisis peneliti mengklasifikasikan aturan akuntansi ke dalam dua kelompok yang membutuhkan auditor dan klien mereka untuk membuat pengungkapan baru (seperti angka laporan keuangan yang disesuaikan dengan inflasi) dan yang membatasi pilihan akuntansi dengan menghilangkan beberapa metode akuntansi yang diminati oleh klien. Penelitian ini bermaksud melihat apakah perusahaan audit mendapat manfaat dari standar yang memberlakukan persyaratan baru karena ini meningkatkan permintaan untuk layanan mereka.

Untuk menyelidiki prediksi ini, penulis melihat teknik lobbying pada enam draft paparan, yang dipilih untuk mewakili kedua jenis standar tentang akuntansi tingkat harga umum, sewa, surat berharga, pelaporan segmen dan akuntansi minyak dan gas serta valuta asing. Dia kemudian mengumpulkan data comment letters untuk 41 perusahaan audit yang melobbying setidaknya salah satu dari draft paparan ini, serta data di sekitar 2.100 dari ini perusahaan klien perusahaan di mana dia dapat menemukan informasi laporan keuangan (termasuk perkiraan efek laporan keuangan dari berbagai standar pada perusahaan-perusahaan ini).

Daripada hanya menganggap comment letters sebagai "menggunakan atau melawan" draft eksposur tertentu, Puro mengakui bahwa posisi comment letters sering lebih rumit, dan sebagai gantinya pertama kali tiba pada satu pertanyaan akuntansi yang diangkat oleh setiap konsep paparan misalnya, seharusnya keuntungan valuta asing dan kerugian dimasukkan dalam pendapatan? Haruskah semua perusahaan minyak dan gas diminta untuk menggunakan metode akuntansi tersebut?). Penulis kemudian membuat tanggapan komentar-komentar perusahaan audit atas pertanyaan-pertanyaan ini seperti untuk, melawan, atau netral.

Puro mengembangkan hipotesis yang dapat diuji tentang lobbying oleh kedua perusahaan audit secara langsung untuk kepentingan mereka sendiri maupun atas nama klien mereka, menggabungkan efek laporan keuangan pada perusahaan klien oleh perusahaan audit.

Analisis pertama melibatkan estimasi serangkaian regresi probit multinomial, yang diperkirakan secara terpisah untuk setiap masalah akuntansi, di mana variabel dependen adalah posisi lobbying perusahaan audit. dikelompokkan seperti menggunakan, melawan, atau netral). Variabel independen adalah proksi untuk berbagai insentif lobbying, dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan pandangan regulasi, seperti apakah aturan yang diusulkan akan meningkatkan pekerjaan mereka, apakah mereka berspesialisasi dalam klien yang menggunakan metode akuntansi tentang aturan yang melarang dan tolak ukurnya serta pandangan agen insentif dari klien perusahaan seperti efek pendapatan dari aturan untuk klien, fraksi klien yang melobbying, dll).

Secara keseluruhan, Puro menemukan lebih banyak dukungan untuk pandangan regulasi daripada untuk pandangan agensi, terutama untuk aturan-aturan yang meningkatkan kerja auditor, meskipun ada beberapa bukti untuk tampilan agensi pada aturan akuntansi lainnya. Hasil ini sebagian besar konsisten dengan Watts dan Zimmerman (1982) di mana mereka menunjukkan bahwa perusahaan audit melobi langsung untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan klien mereka.

Penelitian lain yang berfokus khusus pada lobbying oleh auditor adalah kertas kerja terbaru oleh Allen, Ramanna, Rowchowdhury (2012). Gagasan utama dalam makalah ini adalah untuk memeriksa bagaimana perubahan dalam struktur industri audit, khususnya "pengetatan" oligopoli Big 4 yang mempengaruhi cara perusahaan dalam melobi proses penetapan standar. Argumennya adalah bahwa meningkatkan biaya litigasi dan biaya politik selama periode di mana pengetatan yang terjadi membuat perusahaan-perusahaan ini lebih cenderung melobi peraturan yang meningkatkan keandalan pelaporan keuangan

Seperti yang dibahas dalam konteks Allen dan Ramanna (2013) di bawah ini, masalah lain cenderung lebih menonjol dalam konteks setiap diberikan topik akuntansi. Ini rupanya pilihan pragmatis yang dibuat sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengkarakterisasi semua topik FASB sepanjang satu dimensi (relevansi versus reliabilitas), pertimbangan desain penting dalam penelitian ini. Pertanyaan lain yang menarik adalah sejauh mana lobbying kantor audit ini atas nama klien mereka, sesuatu yang kurang dibahas oleh penelitian tetapi itu adalah masalah penting dalam penelitian ini.

Para penulis menafsirkan hasil mereka sebagai menyiratkan bahwa peningkatan visibilitas perusahaan dari waktu ke waktu, dikombinasikan dengan kurang perhatian tentang preferensi klien mereka untuk kebijaksanaan keuangan, telah menyebabkan kantor audit untuk melobi lebih kuat terhadap standar yang mereka anggap akan menghasilkan keandalan yang lebih rendah.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti, menimbulkan pertanyaan seberapa baik teori ekonomi politik yang ada dari peraturan yang mencirikan pengaturan standar akuntansi atau bagaimana pengaturan standar akuntansi berbeda dari bentuk regulasi lainnya.

Pertama, ada beberapa bukti formal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana penilai standar akuntansi menetapkan agenda mereka. Sementara bukti anekdot menunjukkan bahwa kekuatan politik dapat dalam beberapa kasus secara langsung mempengaruhi agenda, seperti halnya dengan akuntansi minyak dan gas pada tahun 1970-an, tidak jelas seberapa pentingnya kekuatan politik secara umum dalam pengaturan agenda. Ini adalah pertanyaan yang krusial karena keputusan agenda menentukan topik mana yang dipertimbangkan dan mana yang tidak, dan dengan demikian bisa dibilang keputusan paling penting dibuat oleh penentu standar dalam hal menentukan aturan akuntansi yang mulai berlaku.

Kedua, terlepas dari volume penelitian yang relatif besar tentang lobbying comment letters dalam proses penetapan standar, apa yang kita ketahui terbatas. Sebagian besar penelitian ini menganalisis comment letters yang disampaikan oleh para penyusun (perusahaan dan manajer). Ada bukti jelas bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk mengirimkan comment letters meskipun interpretasi hasil ini kurang jelas. Tampaknya penting juga untuk memahami apakah lobbying oleh perusahaan dan industri bergantung pada apakah mereka masuk atau keluar dari bantuan politik pada titik waktu tertentu, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi variasi waktu dan variasi lintas-bidang dalam keterlibatan politik.

Dalam penelitian ini ada beberapa bukti bahwa kegiatan melobbying perusahaan bergantung pada kemungkinan efek dari aturan yang diusulkan pada laporan keuangan mereka (misalnya, efek laporan keuangan yang buruk, terutama penurunan dalam aset bersih dan / atau penghasilan yang dilaporkan meningkatkan kemungkinan lobbying) dan juga lainnya. bukti secara luas konsisten dengan argumen konsekuensi ekonomi seperti korelasi antara lobbying dan penggunaan rencana bonus dan leverage.

Ketiga, meskipun ada jelas situasi di mana politik mempengaruhi hasil penetapan standar akuntansi, seperti dengan ESO pada 1990-an, penulis belum memiliki banyak bukti sistematis tentang peran yang dimainkan politik pada pengaturan standar di luar comment letters,

Dengan begitu penulis dalam makalah ini menawarkan sejumlah saran untuk bagaimana penelitian masa depan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran politik pada pengaturan standar, topik yang jelas dan signifikan untuk semua orang dengan minat dalam pelaporan keuangan. Beberapa saran tersebut adalah:

Penelitian tentang bagaimana seperangkat konstituen yang luas, termasuk penyusun, Big 4, kantor akuntan lainnya, kelompok industri, dan entitas lain berpartisipasi dalam proses politik. Selain melobi melalui comment letters, alat apa yang digunakan entitas ini untuk memengaruhi aturan akuntansi, apakah kadang-kadang entitas ini terlibat dalam proses itu, ketika aturan akuntansi tertentu cenderung mempengaruhi mereka, atau mereka terlibat dalam proses secara konsisten dari waktu ke waktu, dalam hal mana kita perlu mempertimbangkan keterlibatan mereka sebagai permainan multi-periode, peran apa yang dilakukan asosiasi industri dan kelompok lain yang serupa, jenis entitas apa yang berulang kali terlibat dalam proses dan mengapa, bagaimana keterlibatan dalam proses penetapan standar berhubungan dengan tingkat keterlibatan keseluruhan perusahaan dalam proses politik secara lebih umum.

Mengembangkan pemahaman yang lebih kaya tentang karakteristik yang mendasari masalah akuntansi yang bisa memicu terjadinya konflik politik bagi pengatur standar.

Peneliti bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengkarakterisasi tanggapan konstituen untuk mengusulkan aturan FASB.

Kami berharap penelitian ini memiliki banyak potensi, terutama mengingat pentingnya di kalangan pembuat kebijakan akuntansi dimana kebijakan akuntansi telah menjadi fokus peningkatan perhatian politik dan peraturan di bangun dari krisis keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, A., K. Ramanna, and S. Rowchowdhury. 2012. The Auditing Oligopoly and Lobbying on Accounting Standards. Working Paper, Harvard Business School.
Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2187947.
- Allen, A., and K. Ramanna. 2013. Towards an Understanding of The Role of Standard Setters in Standard Setting. *Journal of Accounting and Economics* 55: 66-90.
- Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, 2001.. *Ekonomi Politik dan Kebijakan*
Publik. Jakarta: PT Grasindo.
- Beresford, D. R. 1993. How to succeed as a standard setter by trying really hard.
Accounting Horizons 11: 79-90.
- Bertomeu, J. and R. P. Magee. 2011. From low-quality reporting to financial crises: Politics of disclosure regulation along the economic cycle. *Journal of Accounting and Economics* 52: 209-227.
- Baldwin dan Cave. 1999. *Understanding Regulation : Theory, Strategy, and Practice*. Second Edition. Oxford : Oxford University Press
- Caporaso J.A., Levine D.P. 1992. *Marxian Political Economy : Theories of Political Economy*. Cambridge University Press : Cambridge Books Online :
- Deakin, E. B. 1989. Rational Economic behavior and lobbying on accounting issues: Evidence from the oil and gas industry. *The Accounting Review* 64: 137-151.
- Dechow, P. M., A. P. Hutton, and R. G. Sloan. 1996. Economic consequences of accounting for stock-based compensation. *Journal of Accounting Research* 34: 1-20.
- Deliarinov. 2006. *Mencakup berbagai teori dan konsep yang komperehensif : Ekonomi Politik*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Francis, J. R. 1987. Lobbying Against Proposed Accounting Standards: The Case of Employers; Pension Accounting. *Journal of Accounting and Public Policy* 6: 35-57.
- Gerboth, Dale, L., (1973), "Research, Intuition, and Politic In Accounting Inquiry," *Accounting Review*, July, h. 481.
- Gipper, B., B. Lombardi, and D.J. Skinner. 2013. The Politics of Accounting Standard-Setting: A Review of Empirical Research. *Journal of Accounting Research* p. 1-53.
- Howieson, B. A. 2009. Agenda formation and accounting standard-setting: lessons from the standard setters. *Accounting and Finance* 49: 577-598.
- Horngren, Charles, T. 1973. "The Marketing of Accounting Standards," *JOFA*, Oktober, h. 61.
- Johnston, D. and D. Jones. 2006. How Does Accounting Fit into a Firm's Political Strategy? *Journal of Accounting and Public Policy*. 25: 195-228
- Kelly, L. 1982. Corporate Lobbying and Changes in Financing or Operating Activities in Reaction to FAS No. 8. *Journal of Accounting and Public Policy* 1: 153-173.
- Kelly, L. 1985. Corporate Management Lobbying on FAS No. 8: Some Further Evidence. *Journal of Accounting Research* 23: 619-632.

-
- Leftwich, R. 1995. The agenda of the Financial Accounting Standards Board. Working paper, University of Chicago, November.
- Mardiyah, A.A. 2002. Dampak Proses Politik dan Konsekuensi Ekonomi dalam Pembentukan Suatu Standar. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 3 No. 2, hal: 96-123.
- May, Robert, G., dan Sundem, Gary, L. 1976. "Research for Accounting Policy: An Overview," *Accounting Review*, Oktober, h.750.
- Puro, M. 1984. Audit Firm Lobbying Before the Financial Accounting Standards Board: An Empirical Study. *Journal of Accounting Research* 22: 624-646.
- Ramanna, K. 2008. The Implications of Unverifiable Fair Value Accounting: Evidence from the Political Economy of Goodwill Accounting. *Journal of Accounting and Economics* 45: 253-281.
- Solomons, D. (1978). The Politicization of Accounting, "The Journal of Accountancy", November, h. 65-72.
- Watts, R. L. 1977. Corporate Financial Statements: A Product of the Market and Political Processes. *Australian Journal of Management* 2: 53-75.
- Watts, R. L., and J. L. Zimmerman. 1978. Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review* 53: 112-134.
- Watts, R. L., and J. L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Zeff, S. A. 1972. *Forging Accounting Principles in Five Countries: A History and Analysis of Trends*. Stipes Publishing Company, Champaign, IL.